

**PERSEPSI PEMILIH PEMULA TENTANG HAK POLITIK WARGA  
NEGARA DALAM MENGIKUTI PILKADA PROVINSI  
DI SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG  
TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

**(Jurnal)**

**Penulis**

**Nyi Ayu Chairunnisa  
Irawan Sunoro  
M. Mona Adha**

**Penyunting  
Holilulloh**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2013**

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI PEMILIH PEMULA TENTANG HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM MENGIKUTI PILKADA PROVINSI DI SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

**Oleh**

(Nyi Ayu Chairunnisa, Irawan Suntoro, M. Mona Adha)

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tentang persepsi pemilih pemula tentang hak politik warga negara, persepsi pemilih pemula tentang pemilihan kepala daerah, dan tentang persepsi pemilih pemula tentang hak politik warga negara dalam pemilihan kepala daerah di SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, subjek yang diteliti merupakan siswa SMA Negeri 1 khususnya kelas XI yang berjumlah 272 orang. Sampel yang diambil untuk penelitian adalah 15% atau 41 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik angket, wawancara dan observasi. data dianalisis menggunakan rumus persentase.

Hasil penelitian 1. Persepsi pemilih pemula tentang hak politik warga negara di SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013 masuk dalam katagori kurang paham, 2. Persepsi pemilih pemula tentang pemilihan kepala daerah masuk dalam katagori kurang baik, dan 3. Persepsi pemilih pemula tentang hak politik warga negara dalam mengikuti pilkada di SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2012 pelaksanaan hak politik warga negara dalam mengikuti pemilihan kepala daerah menyatakan setuju.

Kata Kunci: Hak politik warga negara, Pemilihan kepala daerah.

## ABSTRACT

### PERCEPTIONS OF BEGINNER VOTERS ABOUT POLITICAL RIGHTS OF CITIZENS DUE TO PARTICIPATE ON LOCAL ELECTIONS OF LAMPUNG PROVINCE AT SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG SCHOOL YEAR 2012/2013

By

(Nyi Ayu Chairuunisa, Irawan Suntoro, M. Mona Adha)

The purposes of this research are to analyze perceptions of beginner voters about political rights of citizens, perceptions of beginner voters about local elections, and perceptions of beginner voters about political rights of citizens due to local elections at SMA Negeri 1 Bandar Lampung school year 2012/2013.

This research used descriptive method, as subjects are 272 XI Grade students of SMA Negeri 1 particularly. Samples were taken for this research is 15% or 41 Students. The data collection used questionnaire technique, interview, and observation. Data were analyzed by using percentage formula.

The results of research are; 1. Perceptions of beginner voters about political rights of citizens at SMA Negeri 1 Bandar Lampung school year 2012/2013 are included in less understanding category, 2. Perceptions of beginner voters about local elections are included in unfavorable category, and 3. Perceptions of beginner voters about political rights of citizens due to participate on local elections at SMA Negeri 1 Bandar Lampung school year 2012/2013 stated agree.

Keywords: Political rights of citizens, Local Elections.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang dimana warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Warga negara Indonesia berhak memilih para wakilnya di pemerintahan dengan cara pemilu atau pemilihan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk sebagai bukti negara Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.

Pelaksanaan pemilu dilaksanakan sebagai bukti bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai, Pasal 1 dan 2 Undang–Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pemilu merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang terjadi di masyarakat karena partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam kegiatan yang legal dalam kehidupan politik untuk ikut serta mempengaruhi keputusan pemerintahan dan ikut serta memilih wakil-wakil rakyat dikursi pemerintahan.

Pemilu juga merupakan kehendak rakyat atau keinginan rakyat agar ada perubahan dalam proses pemilihan pemimpin melalui pemilu dengan sistem yang lebih baik dan terbuka baik dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah. Tiap pelaksanaan pemilu pasti akan terdapat pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti atau memiliki hak mereka hak pilih untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilu baik itu pemilu presiden ataupun pemilihan kepala daerah.

Namun dalam kenyataan banyak pemilih pemula yang belum mengerti akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam pemilu dan apa sajakah hak warga negara dalam pemerintahan terlebih dalam hak politik warga negara yang mereka miliki. Para pemilih pemula ini juga kurang merespon akan berita-berita tentang politik khususnya tentang pemilihan umum yang akan mereka ikuti sebagai salah satu hak politik warga negara yang mereka miliki.

Namun dalam kenyataan banyak pemilih pemula yang belum mengerti akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam pemilu dan apa sajakah hak warga negara dalam pemerintahan terlebih dalam hak politik warga negara yang mereka miliki.

Memperkenalkan hak politik warga negara terhadap para pemilih pemula atau pelajar ini perlu ada media sebagai penunjang untuk memperkenalkan hak politik itu sendiri kepada para pemilih pemula. Pemerintah mengantisipasi ketidaktahuan para pemilih pemula terhadap hak politik mereka dengan memberikan pendidikan pengetahuan hak dan kewajiban warga negara dalam kurikulum sekolah dalam hal ini pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang ada disekolah dan disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Namun masalah yang ada terkadang sekolah atau guru hanya memberikan pengertian-pengertian dari apa yang ada dipelajaran saja tanpa memberikan pendekatan akan pentingnya ikut serta para pemilih pemula dalam pemilu yang akan dilaksanakan.

Peran orang tua juga dianggap mempunyai andil dalam pengetahuan yang dimiliki pemilih pemula tentang hak politik mereka ketika pelaksanaan pilkada. Seharusnya para orang tua memberi masukan kepada anak-anaknya tentang apa itu pilkada dan memberikan saran pada anak-anaknya yang sudah menjadi pemilih pemula dalam menentukan calon yang akan mereka pilih bukan memaksa untuk memilih yang sama atau mengikuti pilihan orang tua, tetapi orang tua memberikan masukan agar sang anak dapat memilih sesuai dengan hati nurani mereka atau mana yang menurut mereka paling baik untuk menjadi sosok pemimpin daerah.

Pemilih pemula minim akan pengetahuan tentang para kandidat atau calon kepala daerah yang mengikuti pilkada di daerahnya. Mereka akan cenderung mengikuti pilihan orang tua atau teman sejawad maka para pemilih pemula ini menjadi sasaran yang bagus untuk mendapatkan suara bagi para kandidat dengan pendekatan yang menarik perhatian para pemilih pemula.

Hasil survei lainnya juga pada pemilu 2009 menunjukkan 67,55% pemilih pemula belum mengetahui secara pasti tahapan dan sistem pemilu. Tidak hanya itu sebanyak 76,40% bahkan mengaku tidak mengetahui jumlah konstan partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan pemilih pemula pada 2009 lalu masih sangat rendah. Sikap ini terlihat dari 90,01% responden menyatakan tidak bersedia turut serta dalam kegiatan kampanye (KPU Povinsi DKI Jakarta dalam Yulia Andhani 2012 : 5).

Hasil wawancara dengan salah satu murid di SMA N 1 Bandar Lampung yang telah menjadi pemilih pemula saat pelaksanaan pilkada provinsi yang akan datang ia mengatakan bahwa ia belum mengerti dengan jelas tentang hak politik ia sebagai warga negara Indonesia dan peranan ia dalam pemilihan kepala daerah dimana ia berperan sebagai pemilih pemula.

Atas dasar hal inilah penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang persepsi pemilih pemula tentang hak politik warga negara dalam mengikuti pilkada provinsi di SMA N 1 Bandar Lampung.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Persepsi**

Menurut Bimo Walgito (2010: 99) “persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui indera atau proses sensoris namun proses itu tidak berhenti begitu saja melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi”.

Djamarah (2008:126) menyatakan persepsi dapat terdiri dari suatu situasi yang hadir pada seseorang, disini seseorang menghadapi kenyataan yang harus dilihat dan diartikan. Dengan demikian setelah seseorang mengetahui keadaan lingkungannya, semua itu diartikannya pada ingatan dan pikirannya. Pada gilirannya nanti orang tersebut kemudian mengartikan atau menginterpretasikan tentang lingkungan yang dihadapinya dan terakhir orang-orang tersebut akan memberikan umpan balik.

Jadi, persepsi adalah proses penerimaan dan pengolahan informasi yang diterima oleh alat indra dan diproses menjadi stimulus yang disampaikan kepada pikiran seseorang sehingga stimulus tersebut menjadi penilaian atau penafsiran yang diperoleh dari penginderaan dan pengalaman yang sudah terjadi. Memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif.

### **Pengertian Politik**

Miriam Budiardjo (2000: 8) mendefinisikan bahwa "politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu".

David Easton seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo (2000: 13) mengemukakan bahwa "politik adalah kehidupan politik yang mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijaksanaan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan itu".

Jadi, berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan politik adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan dalam hidup bermasyarakat dan dapat ikut andil dalam pengambilan keputusan serta kebijakan didalam pemerintahan.

### **Pengertian Budaya Politik**

Dalam kehidupan bernegara kita selalu berkaitan dengan kehidupan politik. Kehidupan politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kita akan senantiasa bersinggungan dengan politik.

Menurut Alan R. Ball dalam kutipan oleh Bambang T. Purwanto et.al (2010: 7) "*a political culture is the composed of the attitudes, beliefs, emotions, and values of society that relate to the political system and to political issues* (suatu susunan yang terdiri atas sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik)".

Menurut Rahman (2007: 267) "budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan memerintah".

Jadi dapat ditarik kesimpulan tentang apa itu budaya politik dari teori-teori di atas adalah pola tingkah laku individu atau warga negara terhadap sebuah sistem baik perannya dan keikutsertaannya serta penolakannya pada sebuah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sistem tersebut.

## **Hak Politik Warga Negara**

Menurut Notonagorom dalam (<http://7kuadrat.blogspot>.) “hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya”.

Salah satu hak warga negara Indonesia adalah hak politik atau hak dalam bidang politik. Hak dan kewajiban berpolitik warga negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 ayat 1 berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, “pasal ini memuat dua hak yaitu hak dimata hukum dan pemerintahan”.

- a. hak sama dalam hokum setiap warga negara tanpa terkecuali bila melakukan pelanggaran terhadap norma hukum ditindak dan dalam proses peradilan berhak untuk mendapatkan pembelaan. Setiap warga negara tidak bisa langsung dinyatakan bersalah sebelum melalui proses hukum di pengadilan.
- b. Hak sama dalam pemerintahan setiap warganegara tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan. Artinya, setiap warga negara dapat menduduki jabatan-jabatan apa saja dalam pemerintahan, apabila ia memenuhi syarat.

Warga negara pun memiliki hak atas partisipasi politik yang sama. Suatu sistem demokrasi menghargai setiap orang sebagai makhluk moral dan rasional yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab atas dirinya sendiri.

Menurut piagam PBB dan perjanjian hak-hak sipil dan politik serta definisi hak politik dapat diklasifikasikan menjadi tujuh macam hak politik:

1. Hak untuk memiliki dan menyatakan pendapat dengan tenang.
2. Hak untuk berserikat dan berkumpul.
3. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara.
4. Hak untuk ikut serta dalam pemilu.
5. Hak kebebasan menentukan status politik.
6. Hak untuk memilih dan dipilih.
7. Hak untuk mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara.

## **Pemilih pemula**

Menurut M. Rusli Karim dalam Tubagus Ali (2012: 102) menyatakan bahwa”pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang belum memiliki pengalaman sama sekali menusuk tanda gambar organisasi politik”.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 Undang-Undang No. 10 tahun 2008 merupakan dasar hukum siapa yang dapat dikatagorikan sebagai pemilih pemula. Pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau

lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang pemilu.

Jadi dapat disimpulkan menurut sumber diatas yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada saat pemungutan suara sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah pernah menikah maka ia akan mendapatkan hak politiknya sebagai warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam pemilu dan dapat memberikan hak pilihnya.

### **Pemilihan Kepala Daerah**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh elit politik di DPRD seperti era orde baru, melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada.

Menurut Zuhro, dkk (2009: 48) pilkada merupakan “momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif”.

Sedangkan menurut Jenedri M. Gaffar dalam Mahfud MD, dkk (2012: XI) pilkada merupakan “salah satu momentum politik penting yang mengawali proses pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Jadi pilkada adalah salah satu cara memajukan daerah dengan cara memilih langsung kepala daerahnya dengan harapan agar daerahnya menjadi lebih maju.

### **Metedologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif menurut M. Ali dalam Dwi (2012: 39) bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada masa sekarang dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan data, membuat klasifikasi data, dan analisis atau pun pengolahan data, membuat kesimpulan, dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara obyektif dalam suatu deskripsi situasi.

Menurut Suharsimi Arikunto “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. (2010:173).

Jadi dengan menarik kesimpulan dari pendapat ahli diatas maka populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini siswa SMA N 1 Bandar Lampung dalam hal ini siswa/i kelas XI yang berjumlah 272 siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 % dari 272 siswa diambil dari jumlah populasi jadi,  $15\% \times 272 = 40.8$  dibulatkan menjadi 41

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka diterapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut angket, wawancara, observasi, dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Penyajian data persepsi pemilih pemula tentang hak politik warga negara dalam mengikuti pilkada provinsi setelah daftar tes terkumpul dapat dilihat dalam tabel

**Tabel 8: Distribusi frekuensi dari indikator pemahaman**

No	Kategori	Kelas interval	Frekuensi	Persentase
1	Paham	23 – 24	11	26,83%
2	Kurang paham	21 – 22	17	41,46%
3	Tidak paham	19 – 20	13	31,71%
<b>Jumlah</b>			<b>41</b>	<b>100%</b>

Sumber: Analisis data distribusi frekuensi tahun 2013

Berdasarkan hasil perhitungan data yang dilakukan maka persepsi pemilih pemula tentang hak politik warga negara masuk dalam katagori kurang paham ini dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pemilih pemula tentang hak politik mereka sebagai warga negara. Kurang pahamnya pemilih pemula tentang hak politik warga negara ini dikarenakan kurangnya informasi yang mereka terima tentang apa saja hak politik mereka. Ada pula karena mereka tidak mendengarkan atau memperhatikan saat guru Pendidikan Kewarganegaraan menjelaskan kepada mereka tentang hak politik yang dimiliki mereka sebagai warga negara Indonesia .

**Tabel 9 : Distribusi frekuensi dari indikator tanggapan/pendapat**

No	Kategori	Kelas interval	Frekuensi	Persentase
1	Baik	20 – 21	10	24,39%
2	Kurang baik	18 – 19	18	43,90%
3	Tidak baik	16 – 17	13	31,71%
<b>Jumlah</b>			<b>41</b>	<b>100%</b>

Sumber: Analisis data distribusi frekuensi tahun 2013

Berdasarkan hasil perhitungan data bahwa dalam persepsi pemilih pemula tentang pilkada di SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013 masuk kepada kategori kurang baik ini dikarenakan mereka belum mengerti benar apa itu pemilihan kepala serta kegunaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini semua dikarenakan mereka yang baru saja akan menjadi peserta pemilihan kepala daerah untuk pertama kalinya dimana saat mereka sudah memenuhi syarat sebagai pemilih

pemula yaitu sudah berumur 17 tahun atau lebih, belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam bilik TPS, belum memiliki pengalaman memilih, memiliki antusias yang tinggi namun harus tetap memiliki pengetahuan yang memadai, pemikiran yang kurang rasional menjadikan mereka memiliki persepsi tentang pemilihan kepala daerah masuk dalam katagori kurang baik. Hal ini juga diakibat pendidikan politik yang kurang sejak masa orde baru yang terkenal dengan konsep depolitisasi. Karena depolitisasi ini memunculkan pobia di satu sisi dan eforia di satu sisi. Depolitisasi ini menyebabkan rendahnya kedewasaan politik rakyat terutama di kalangan pemilih pemula.

**Tabel 10: Distribusi frekuensi dari indikator harapan**

No	Kategori	Kelas interval	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	13 – 25	23	56,10%
2	Kurang setuju	10 – 12	11	26,83%
3	Tidak setuju	7 – 9	7	17,07%
<b>Jumlah</b>			<b>41</b>	<b>100%</b>

Sumber: Analisis data distribusi frekuensi tahun 2013

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam persepsi pemilih pemula tentang hak politik warga negara dalam mengikuti pilkada di SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013 masuk dalam katagori setuju ini dikarenakan mereka memiliki harapan yang baik tentang keikutsertaan mereka menggunakan hak politik mereka dalam mengikuti pemilihan kepala daerah, mereka memiliki harapan yang baik dengan hadirnya pemilihan kepala daerah yang akan mereka ikuti menjadi salah satu cara memilih kepala daerah secara langsung yang diharapkan daerah dapat menjadi lebih maju. Serta pemilihan kepala daerah diharapkan dapat mengurangi kearoganan DPRD, membatasi kekuasaan dan kewenangan DPRD, menghasilkan kepala daerah yang lebih bermutu, menghasilkan pemerintahan yang stabil, produktif, dan efektif serta tidak mudah dirobokkan oleh politisi lokal, dan diharapkan dengan keikutsertaan mereka dalam pemilihan kepala daerah ini dapat mengurangi praktek politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data instrumen penelitian berupa angket, dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi pemilih pemula tentang hak politik warga negara di SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013 masuk dalam katagori kurang paham ini menyatakan pemilih pemula kurang memahami karena kurangnya

informasi dan pengetahuan yang diterima para pemilih pemula tentang hak politik warga negara yang ia miliki.

2. Persepsi pemilih pemula tentang pemilihan kepala daerah masuk dalam katagori kurang baik ini dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki pemilih pemula tentang pemilihan kepala daerah serta karena ini pengalaman pertama bagi pemilih pemula. Akibat pendidikan politik yang kurang menyebabkan rendahnya kedewasaan politik terutama dikalangan pemilih pemula.
3. Persepsi pemilih pemula tentang hak politik warga negara dalam mengikuti pilkada di SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2012 pelaksanaan hak politik warga negara dalam mengikuti pemilihan kepala daerah menyatakan setuju. Ini dikarenakan para pemilih pemula mengharapkan dengan adanya hak politik warga negara dalam mengikuti pemilihan kepala daerah akan mewujudkan pemerintahan yang ideal serta sesuai harapan yang diinginkan.

Persepsi pemilih pemula tentang hak politik warga negara ini merupakan suatu pedoman bagi mereka dalam mengetahui apa saja hak politik mereka sebagai warga negara serta agar para pemilih pemula atau dalam hal ini siswa untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini hasilnya sesuai dengan harapan.

### **Saran**

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis ingin memberikan saran bahwa:

1. Kepada Pemerintahan instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum dalam hal ini KPU (Komisi Pemilihan Umum) diharapkan andilnya dalam memperkenalkan pelaksanaan pemilihan umum kepada siswa-siswi SMA dengan cara melakukan pelaksanaan *workshop* dan mengadakan simulasi-simulasi pelaksanaan pemilihan umum guna memperkenalkan tata cara pemilihan umum kepada para pemilih pemula.
2. Kepada Kepala Sekolah agar lebih memperhatikan fasilitas yang dimiliki sekolah, yang bertujuan memberi kemudahan bagi siswa dalam mendukung kegiatan belajar. Fasilitas tersebut baik dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah.
3. Kepada guru mata pelajaran PKn dapat meningkatkan kreatifitas dalam mengajar dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan siswa dalam pembelajaran,serta diharapkan dapat memberikan penjelasan materi dengan jelas dan do sertai contoh agar siswa lebih gampang serta cepat dalam memahami materi.
4. Kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Bandar Lampung untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang ada disekolah guna mencari informasi

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan belajar agar menjadi lebih banyak memiliki pengetahuan. Dan diharapkan untuk lebih giat dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Rineka Cipta : Yogyakarta. 411 Hal.
- Budiarjo, Mariam. Prof. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dwi Nirmala Sari. 2012. *Persepsi Tokoh Adat Tentang Pelestarian Kebudayaan Masyarakat Desa Dan Kota Di Desa Martaram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan fkip. Tidak diterbitkan.
- MD, Mahfud. 2012. *Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilu Kada di Indonesia, Jakarta*. Konstitusi Perss (Konpress).
- Purwanto, T Bambang, Sunardi. 2010. *Membangun Wawasan Kewarganegaraan 2*. Jakarta. Yudistira.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung. 456 Hal.
- Tubagus Ali Rachman Puja Kusuma. 2012. *Pengaruh Pemahaman Siswa Tentang Konsep Budaya Politik Dan Pembentukan Civic Skills Terhadap Tingkat Aspirasi Pemilih Pemula Di SMA AL-KAUTSAR Kota B. Lampung*. Sekolah Pascasarjana Universitas Lampung. Tidak diterbitkan.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 2012. Sendang Ilmu. Solo. 48 halaman.
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Zuhro, Siti R, dkk. 2009. *Demokrasi Lokal perubahan dan kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumbar, Sulsel dan Bali*
- Omb <http://blog.ub.ac.id/mustanginkimia/2011/12/03/hak-hak-politik-dalam-perspektif-islam/> diakses pada 8 Januari pukul 10.00 WIB
- <http://7kuadrat.blogspot.com/2012/04/hak-dan-kewajiban-hukum-warganegara.html> diakses pada 8 Januari pukul 10.00 WIB

